

TEKNIK KOMUNIKASI KOERSIF DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SAMARINDA

Kiki Rosiana¹

Abstrak

Kiki Rosiana, 2017, Artikel ini berisi tentang kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam melakukan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui teknik komunikasi koersif, di bawah bimbingan Bapak Drs. Sugandi, M.Si dan Ibu Hj. Hairunisa, S.Sos., M.M.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik komunikasi koersif yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda. Metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data Model Interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial telah melakukan kegiatan penertiban kepada gelandangan dan pengemis. Penanggulangan yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial adalah melakukan kegiatan pengurangan gelandangan dan pengemis di jalanan, dimana gelandangan dan pengemis ditertibkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Selain itu teknik yang digunakan adalah teknik komunikasi koersif, yaitu dimana Dinas Kesejahteraan Sosial melakukan penertiban secara paksaan kepada gelandangan dan pengemis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik komunikasi koersif yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial belum berjalan dengan lancar atau rutin dikarenakan adanya faktor faktor yang menghambat terlaksananya kegiatan penertiban gelandangan dan pengemis.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis dengan teknik komunikasi koersif yaitu dengan menertibkan para gelandangan dan pengemis secara paksaan demi terwujudnya tujuan dalam penertiban tersebut adalah untuk membuat pemandangan kota menjadi lebih indah.

Kata kunci : *Penertiban Gelandangan Dan Pengemis, Komunikasi Koersif*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kiky_ap@yahoo.com

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan pembangunan nasional serta pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Pada saat ini permasalahan yang sering dihadapi dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang di mana hampir setiap daerah jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan khususnya di samarinda.

Akan tetapi melihat pada zaman sekarang sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang hidup di jalanan yang dalam penghidupannya masih memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar kiranya dapat berkehidupan normal.

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan menggunakan istilah gelandangan, dan sering dipadukan dengan pengemis, sehingga dikenal dengan istilah *gepeng*. Salah satu peraturan yang langsung menyebut istilah gelandangan dan pengemis adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial (sudah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2009). Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah merumuskan : *Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.* (UUD tahun 1945, pasal 34 ayat 1, tentang Kesejahteraan Sosial).

Sebagai salah satu kota terbesar di kawasan Indonesia ialah Samarinda, pemerintah kota (pemkot) masih dipusingkan dengan berbagai masalah tentang kesejahteraan sosial terutama pada kasus anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal ini diakibatkan karena kota Samarinda yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur menjadi kota tujuan urbanisasi. Hal ini berdampak pada peningkatan masyarakat berbagai tingkatan sosial bermukim di Samarinda

sehingga hal ini berakibat pada kesenjangan sosial dan menjamurnya gelandangan serta pengemis. Di kota Samarinda permasalahan gelandangan serta pengemis merupakan permasalahan yang sangat sulit di pecahkan oleh

pemerintah kota, apalagi kebanyakan gelandangan serta pengemis yang berada di kota Samarinda masih di bawah umur (anak-anak).

Dinas Kesejahteraan Sosial Samarinda sudah sangat berperan penting dalam permasalahan gelandangan dan pengemis yang berada di kota Samarinda. Berbagai cara untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di kota Samarinda tidak hanya dengan cara bersosialisasi tetapi sudah mencapai tahap pemaksaan (koersif) agar menekan jumlah gepeng semakin berkurang.

Pengertian koersif dalam komunikasi adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk merubah sikap, opini, dan tingkah laku.

Dari tahun ke tahun permasalahan sosial seputar gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Samarinda semakin bertambah. Persoalan gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang sulit diatasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda telah berulang kali melakukan razia dan mengamankan gelandangan dan pengemis, tetapi mereka kemudian beroperasi lagi karena tidak ada upaya yang lebih konkrit.

KERANGKA DASAR TEORI

Komunikasi Koersif

Komunikasi koersif adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk merubah sikap, opini, dan tingkah laku. Para ahli komunikasi sering kali menekankan bahwa persuasi adalah kegiatan psikologis. Penegasan ini dimaksudkan untuk mengadakan perbedaan dengan *koersi (coersion)*. Tujuan persuasi dan koersi adalah sama, yakni untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, tetapi jika persuasi dilakukan dengan cara halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi, koersi mengandung sanksi atau ancaman. Perintah, intruksi, bahkan suap, pemerasan adalah koersi. Akibat dari kegiatan koersi adalah perubahan sikap, pendapat, atau perilaku dengan perasaan terpaksa karena diancam, yang menimbulkan rasa tak senang, bahkan rasa benci, mungkin juga dendam. Sedangkan akibat dari kegiatan persuasi adalah kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang.

Pengendalian Sosial

Setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang tentram, damai, dan teratur. Dengan itulah masyarakat perlu suatu sistem untuk mengatur semua perilaku yang menjadi tujuan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat perlu ada pengendalian sosial. Pengendalian sosial sering diartikan sebagai proses pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain dan mengajarkan, membujuk, atau memaksa individu maupun kelompok sebagai bagian dari masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Bruce J Cohen pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok atau masyarakat tertentu.

Proses Pengendalian Sosial

1. Secara persuasif

Pengendalian sosial secara persuasif dilakukan dengan cara lemah-lembut, membimbing atau mengajak individu untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat bukan dengan cara kekerasan.

2. Secara koersif

Pengendalian sosial secara koersif dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Karena penyimpangan yang telah berulang-ulang kali atau yang telah merugikan orang banyak hendaknya dilakukan dengan paksaan. Pengendalian sosial dengan kekerasan dibedakan menjadi dua:

- a. Kompulsi (paksaan), artinya keadaan yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya dan menghasilkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung.
- b. Pervasi (pengisian), secara pengertian pervasi merupakan cara penanaman atau pengenalan norma secara berulang-ulang sehingga orang akan mengubah sikapnya sesuai dengan yang diinginkan.

Gelandangan Dan Pengemis

Istilah *gepeng* merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan dan Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan tempat tinggal tidak menetap serta mengembara di tempat umum.

Pengemis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Permasalahan pengemis dan gepeng, sebenarnya hanyalah turunan dari permasalahan kemiskinan. Selama persoalan kemiskinan belum teratasi jumlah pengemis, dan gepeng tidak akan pernah berkurang malah jumlahnya akan semakin bertambah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan dan Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Pengemis adalah orang-orang yang melakukan aktifitasnya dengan meminta-minta di depan umum atau di badan jalan dan atau di simpang-simpang jalan dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Perilaku menggembel dan mengemis erat kaitannya dengan urbanisasi, dan urbanisasi erat kaitannya dengan adanya kesenjangan pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan. Semasih adanya kesenjangan ini maka urbanisasi akan sulit dibendung, dan akan memberi peluang munculnya kegiatan sector informal seperti kegiatan menggembel dan mengemis. Kebijakan penanggulangan gepeng yang dikembangkan adalah dengan lebih memacu pembangunan pedesaan agar serasi dengan pembangunan di daerah perkotaan.

Ciri-ciri gelandangan dan pengemis yaitu tidak memiliki tempat tinggal, hidup dibawah garis kemiskinan, hidup dengan penuh ketidakpastian, memakai baju yang compang camping, tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, tuna etika, dan meminta-minta di tempat umum.

Penertiban Dan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah suatu tindakan, proses, cara atau perbuatan yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan dan menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis demi mewujudkan ketertiban umum. (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan dan Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan).

Komunikasi Sosial Pembangunan

Komunikasi sosial dan pembangunan (Mulyana, 2007) merupakan gabungan dari dua istilah yaitu, komunikasi sosial dan komunikasi pembangunan. Kedua istilah tersebut mempunyai materi bahasan yang di dalamnya di dalamnya terkandung ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana komunikasi harus dilakukan, sehingga berperan pada suatu penunjang pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka menciptakan perubahan pada suatu sistem sosial.

Pengertian komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada konteks ini, komunikasi pembangunan dilihat sebagai rangkaian usaha mengkomunikasikan pembangunan kepada masyarakat, agar mereka ikut serta dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa.

Teori Laswell

Model ini dikemukakan oleh Harold Lasswell tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Model komunikasi Lasswell mencakup :

- a. Unsur sumber (*who*, siapa)
- b. Unsur pesan (*says what*, mengatakan apa)
- c. Saluran komunikasi (*in which channel*, pada saluran yang mana)
- d. Unsur penerima (*to whom*, kepada siapa)
- e. Unsur pengaruh (*with what effect*, dengan pengaruh apa)

Yang dimaksud dengan pertanyaan *who* tersebut adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi atau persatuan.

Pertanyaan kedua adalah *says what* atau apa yang dikatakan. Pertanyaan ini adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau pesan apa yang disampaikan dalam komunikasi tersebut.

Pertanyaan ketiga adalah *to whom*. Pertanyaan ini maksudnya menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari komunikasi. Atau dengan kata lain kepada siapa komunikator berbicara. Hal ini perlu diperhatikan karena penerima pesan ini berbeda dalam banyak hal misalnya, pengalamannya, kebudayaannya, pengetahuannya dan usianya.

Pertanyaan yang keempat adalah *in which channel* atau melalui media apa. Yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi, seperti berbicara, gerakan badan, kontak mata. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak semua media cocok untuk maksud tertentu. Kadang-kadang suatu media lebih efisien digunakan untuk maksud tertentu tetapi untuk maksud yang lain tidak.

Pertanyaan terakhir dari model Lasswell ini adalah *what effect* atau apa efeknya dari komunikasi tersebut. Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal yaitu apa yang ingin dicapai dengan hasil komunikasi tersebut dan kedua, apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode studi kasus.

Sumber Data Dan Jenis Data

Pada penelitian studi kasus ini jenis data yang akan didapatkan peneliti berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat melalui penelusuran dan penelaahan kepustakaan yang berupa dokumen pribadi dan dokumen resmi terkait dengan eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 4, 2013: 188-199 194 masalah penelitian, buku dan majalah ilmiah, dokumen profil objek yang diteliti, maupun data *online*.

Pada penelitian ini yang menjadi *Key Informan* yaitu Ibu Dra. Hj. Lilydy Sarimawati, M.Si sebagai KASI RTS dan KPO Dinas Kesejahteraan Sosial. Sedangkan data tambahannya didapat dari dokumentasi berupa dokumentasi foto-foto kegiatan penertiban gelandangan dan pengemis, maupun dokumen/arsip dari Dinas Kesejahteraan Sosial.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (Library research)
2. Penelitian lapangan (Field Research)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Empat jenis kegiatan analisis itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif, dimana peneliti harus siap bergerak diantara empat hal tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Samarinda

Dalam terwujudnya kesejahteraan sosial secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, salah satu hal yang menjadi perhatian Dinas Sosial adalah masalah gelandangan dan pengemis atau yang biasa disebut dengan *gepeng* yang belakangan ini meningkat. Menurut Dinas Sosial Kota Samarinda perkembangan gelandangan dan pengemis saat ini setiap tahunnya meningkat. Untuk itu selaku Dinas yang bertanggung jawab dalam masalah sosial tersebut, Dinas Sosial memiliki cara dalam mengatasi gelandangan dan pengemis tersebut, yang mana nantinya diharapkan dapat mengurangi masalah sosial yang ada, khususnya masalah gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda. Demi kelancaran atau kemudahan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial Kota Samarinda saat ini melibatkan Satpol PP Kota Samarinda, POLRESTA Samarinda, Dinas Sosial Provinsi, dan Panti Sosial Provinsi atau PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) . Dinas Sosial Kota Samarinda dan lembaga yang terlibat melakukan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu dengan cara penertiban. Kegiatan penertiban tersebut yang biasa disebut dengan *razia*.

Dinas Sosial Kota Samarinda dan lembaga yang terlibat melaksanakan kegiatan penertiban tersebut setiap 2 sampai 4 kali dalam setahunnya. Kegiatan penertiban tersebut dilakukan di beberapa tempat seperti di simpang lampu merah, di tempat ibadah, pasar dan lain-lain. Dinas Sosial Kota Samarinda selain itu juga dibantu dengan satu Yayasan yaitu Yayasan Borneo Insan Mandiri dalam hal pembinaan gelandangan dan pengemis. Hasil dari penertiban tersebut Dinas Sosial Kota Samarinda dan lembaga-lembaga yang terlibat berhasil menangkap atau merazia gelandangan dan pengemis dari berbagai usia dan berbagai daerah asal mereka.

Komunikasi Koersif

Dinas Kesejahteraan Sosial melakukan komunikasi yang berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain-lainnya yang bersifat paksaan, sehingga gelandangan dan pengemis yang di jadikan sasaran (komunikan) melakukannya secara

terpaksa. Tetapi dengan begitu sampai saat ini gelandangan dan pengemis belum merasakan efek jera terhadap kegiatan penertiban tersebut. Akibatnya jumlah gelandangan dan pengemis semakin bertambah, bahkan gelandangan dan pengemis tersebut kembali beraksi setelah dipulangkan ke daerah asalnya dan kemudian mereka kembali lagi beroperasi di jalanan.

Faktor Pendukung dan penghambat Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara yang penulis lakukan, faktor yang mendukung Dinas Kesejahteraan Sosial dalam kegiatan penertiban gelandangan dan pengemis yaitu melibatkan lembaga-lembaga pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penertiban. Karena jumlah para gelandangan dan pengemis yang sangat banyak. Selain itu setelah kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan, para gelandangan dan pengemis akan ditampung di Yayasan Borneo Insan Mandiri untuk dibina dan juga Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda memulangkan para gelandangan dan pengemis ke daerah asalnya. Tetapi realitanya belum ada efek jera dari gelandangan dan pengemis tersebut, masih ada gelandangan dan pengemis yang masih dan kembali beroperasi di jalanan. Karena ada beberapa faktor yang menghambat dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. Tingkat sosial masyarakat zaman sekarang sangat tinggi, oleh sebab itu gelandangan dan pengemis merasa nyaman untuk mencari nafkah dengan belas kasihan dari masyarakat. Selain itu dana yang dianggarkan kepada Pemerintah Kota Samarinda sangat minim. Jika dana yang sangat minim, tentu saja kegiatan penertiban tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Gelandangan dan pengemis pun semakin menjamur di setiap jalan Kota Samarinda. Informasi akan diadakannya penertiban bisa juga diketahui terlebih dahulu oleh gelandangan dan pengemis. Oleh sebab itu Dinas Kesejahteraan Sosial mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah :

1. Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial dilakukan 3 sampai 4 kali dalam setahun sesuai dengan dana yang tersedia oleh pemerintah. Penanggulangan yang dimaksud adalah cara mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Samarinda dengan cara merazia, atau yang disebut dengan kegiatan penertiban. Kegiatan tersebut gelandangan diamankan secara paksa oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, dan juga melakukan kerjasama dengan Yayasan Borneo Insan Mandiri dalam hal pembinaan.
2. Teknik Komunikasi Koersif
Dinas Kesejahteraan Sosial melakukan penertiban secara paksa kepada gelandangan dan pengemis adalah cara untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis. Strategi Dinas Kesejahteraan Sosial dalam memilih teknik koersif diakui sebagai suatu proses untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan

perilaku para gelandangan dan pengemis. Dinas Kesejahteraan Sosial menggunakan cara paksaan tersebut karena para gelandangan dan pengemis tidak mau ditertibkan dikarenakan gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal lebih suka hidup dijalanan dan para pengemis lebih suka mencari uang dengan meminta belas kasihan kepada masyarakat. Efek komunikasi koersif yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial dalam kegiatan penertiban tidak selalu membuahkan hasil yang baik. Karena ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya kegiatan penertiban tersebut, tetapi juga ada beberapa faktor yang mendukungnya.

3. Faktor pendukung dan penghambat

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya peran serta Pemerintah Kota Samarinda, LSM, serta instansi terkait dalam penanganan dan penertiban gelandangan dan pengemis.
- 2) Kepedulian sebagian masyarakat dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
- 3) Adanya dana yang tercukupi untuk menjalankan kegiatan penertiban gelandangan dan pengemis.

b. Faktor Penghambat

- 1) Sumber dana yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan (minim), sehingga mengakibatkan proses penertiban yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial berupa biaya untuk memulangkan para gelandangan dan pengemis tidak terlaksana dengan baik.
- 2) Sebagian masyarakat yang ada di Kota Samarinda tingkat sosialnya terlalu tinggi untuk memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
- 3) Fasilitas atau tempat penampungan untuk gelandangan dan pengemis yang terbatas, sehingga para gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Samarinda masih banyak yang belum ditertibkan.

Saran

Dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran-saran yang dapat berguna dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk proses penertiban atau menanggulangi gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, antara lain:

1. Dalam hal ini penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial hendaknya dilakukan dengan serius dan bersungguh-sungguh, kemudian teknik komunikasi koersif yang digunakan Dinas Kesejahteraan Sosial memang terkesan kasar jika orang melihatnya, namun dengan cara tersebut pemandangan di daerah Kota Samarinda akan lebih indah tanpa adanya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di jalanan. Dinas Kesejahteraan Sosial dengan usahanya yang sedikit memaksa gelandangan dan pengemis untuk ditertibkan menjadi penting, terlebih jika ada

beberapa gelandangan dan pengemis yang sulit untuk ditertibkan seperti memberontak pada saat kegiatan penertiban.

2. Dinas Kesejahteraan Sosial hendaknya merealisasikan secepatnya masalah penampungan / rumah singgah untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan.
3. Hendaknya Pemerintah Kota Samarinda menegaskan tentang larangan pemberian dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra AdityaBakti
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Miles, Mattew B, dan Huberman A, Michael. 2007. *Analisa Data Kualitatif, buku sumber tentang metode-metode baru*, UI, Jakarta
- Mulyana, Deddy. 2007. *Komunikasi Pembangunan*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiadi, Muhammad Elly , dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosia: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Internet:

- <https://www.myslawlibrary.wordpress.com/2012/04/09/gelandangan-dan-pengemis/> (diakses pada tanggal 23 Desember 2014).
- https://www.academia.edu/8064323/KESEJAHTERAAN_SOSIAL_Hak_Masyarakat_and_Kewajiban (diakses tanggal 28 Desember 2015)
- <http://dinsos.kaltimprov.go.id/> (diakses tanggal 28 Desember 2015)

Dokumen:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980
2. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Ayat 1, Pasal 34, Tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan dan Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan.